

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional yaitu *Universal Declaration of Human Right (1948)*, *Millennium Development Goals (MDGs)*. Bahkan dalam kesepakatan *MDGs* dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah lapangan pekerjaan yang ada, masyarakat kesulitan dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat dari kondisi ini, masyarakat sekitar mengalami krisis ekonomi berkepanjangan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam bidang kesejahteraan pangan[1].

Pada umumnya masyarakat Petekayan mata pencahariannya sebagian besar melalui industri rata-rata 2.009 orang, adapun pekerjaan lainnya yaitu penggalian terdapat 5 orang, petani sebanyak 200 orang, usaha listrik dan gas sebanyak 2 orang, konstruksi sebanyak 6 orang, perdagangan sebanyak 247 orang, usaha kos dan rumah makan sebanyak 25 orang, usaha transportasi sebanyak 30 orang, usaha informasi dan komunikasi sebanyak 8 orang, usaha keuangan dan asuransi sebanyak 10 dan jasa lainnya sebanyak 1.948 orang, demikian tersebut diambil dari data penduduk masyarakat menurut mata pencaharian yang ter-update di BPS pada tahun 2014.

Dalam menanggulangi krisis ekonomi, pemerintah membuat kebijakan pengadaan beras dan penyaluran beras. Secara khusus kepada perum bulog diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pangan[1].

Desa Petekeyan yang terletak di kecamatan Tahunan kabupaten Jepara adalah salah satu desa yang memperoleh bantuan beras miskin. Pembagian beras miskin sampai saat ini belum sampai ditangan warga miskin yang benar-benar membutuhkan, Sistem pendukung keputusan ini dilakukan dengan penilaian, perhitungan dan menentukan bobot dari variabel-variabel kriteria yang ada. Variabel kriteria yang digunakan di sistem inidiantaranya: penghasilan, pekerjaan, jumlah keluarga bersekolah, luas bangunan, jenis dinding, jenis lantai dan kepemilikan aset. Kriteria-kriteria tersebut diambil dari 14 kriteria warga miskin yang sudah ditetapkan menurut Badan Pusat Statistik.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) / *Decision support system* (DSS) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh michael S. Scott Morton dengan istilah *Management Decision System*. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan [2].

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) adalah metode pengambilan keputusan untuk suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur kemudian dipecahkan. Metode ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Thoms L. Saaty, guru besar Whaton School, University of Pensylvania pada tahun 1971 sampai 1975. Saaty menyatakan bahwa AHP adalah suatu model untuk membangun gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi-asumsi dalam memperoleh pemecahan yang diinginkan[4].

Sistem pendukung keputusan ini membantu memudahkan dan mempercepat proses penentuan penerima raskin. Sistem pendukung keputusan ini melakukan penilaian, perhitungan dan menentukan bobot dari variabel-variabel kriteria yang ada. Variabel kriteria yang digunakan di sistem inidiantaranya: penghasilan, pekerjaan, jumlah keluarga bersekolah, luas bangunan, jenis dinding, jenis lantai dan kepemilikan aset. Kriteria-kriteria diatas diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan penerima Raskin lebih cepat dan tepat.

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis mengambil judul ***“Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dengan metode Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus pada Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara)”***.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan untuk dijadikan sebagai alternatif seleksi penerima beras untuk keluarga miskin di desa Petekeyan bisa tepat tujuan?
2. Bagaimana menerapkan metode AHP untuk menentukan keluarga miskin yang layak mendapatkan raskin?

## **1.3 Batasan Masalah**

Beberapa batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis sistem dengan menggunakan metode AHP
2. Bahasa Program yang digunakan adalah SQL dan Visual Basic
3. Penerapan aplikasi ini pada dekstop yang akan dijalankan oleh admin dengan memasukkan data-data warga, kriteria dan subkriteria yang akan terhubung langsung dengan database
4. Data mata pencahariaan di dapatkan dari salah satu instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian berupa tabel serta keterangan dari daerah tersebut

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai peneliti diantaranya:

1. Membangun sistem pendukung keputusan yang dijadikan jalan alternatif seleksi penerima beras untuk keluarga miskin di desa Petekeyan
2. Membuat sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin yang layak mendapatkan raskin dengan menggunakan metode AHP

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Perancangan dan penelitian ini bermanfaat :

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk warga yang berhak masuk dalam seleksi penerima beras untuk keluarga miskin
2. Memberikan alternatif yang akan membantu menentukan seorang warga yang layak atau tidak layak menerima bantuan beras miskin